

PENGARUH KINERJA KEUANGAN PADA ALOKASI BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BALI TAHUN 2006 S.D. 2013

**I Ketut Arsa¹
Nyoman Djinar Setiawina²**

¹Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia

email: i_ketutarsa@yahoo.co.id

Abstract: The Impact of the Financial Performance Component on Capital Expenditures and Economic Growth. This study was aimed to examine the directly influence of the financial performance component on the capital expenditure of local government, examine the directly influence of the allocation of capital expenditure on economic growth and examine the indirectly influence of the financial performance on economic growth through capital expenditure of district/city in The Province of Bali. Data, analyzed using path analysis with Eviews program, were based on secondary data (a panel data that is a combination of cross section data with time series data). The results showed that the degree of decentralization and effectivity of local revenue (PAD) had positive effect on capital expenditure, while the financial dependence had negative effect on capital expenditures. Capital expenditures had positive effect on economic growth. Three of the five indicators financial performance of local governments, such as the level of decentralization, financial dependence, and the effectiveness of local revenue (PAD), had indirectly effect on economic growth in the District/City through allocation of capital expenditures in The Province of Bali.

Keywords: capital expenditures, economic growth, financial performance

Abstrak: Pengaruh Komponen Kinerja Keuangan pada Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh langsung komponen kinerja keuangan pada alokasi belanja modal pemerintah daerah, menguji pengaruh langsung alokasi belanja modal pada pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah dan menguji pengaruh tidak langsung komponen kinerja keuangan pemerintah daerah pada pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur (*path analysis*) dengan Program *Eviews* berdasarkan data sekunder berupa data panel yang merupakan gabungan antara data silang (*cross section*) dengan data runtut waktu (*time series*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi dan efektivitas PAD berpengaruh positif pada belanja modal, sedangkan ketergantungan keuangan berpengaruh negatif pada belanja modal. Alokasi belanja modal berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Tiga dari lima indikator kinerja keuangan pemerintah daerah, berupa tingkat desentralisasi, ketergantungan keuangan, dan efektivitas PAD, secara tidak langsung berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali.

Kata Kunci: belanja modal, kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Pembangunan merupakan suatu rangkaian proses perubahan menuju keadaan

yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004), salah satu indikator makro keberhasilan pembangunan diantaranya dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah. Faktor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain ketersediaan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, pembentukan modal, dan teknologi.

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 yang menjadi landasan

utama dalam pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah untuk mendekatkan pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat dan memberikan kebebasan yang lebih besar kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik menyangkut sumber daya manusia, dana maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Dalam menyusun anggaran, pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif, karena pada umumnya penganggaran akan menghadapi masalah pengalokasian. Masalah pengalokasian ini terutama terkait dengan sumber daya.

Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Rasio belanja modal pada total belanja daerah mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal. Belanja Modal ditambah belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah yang diharapkan memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah, selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri.

Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), sebagai tolok ukur pertumbuhan suatu ekonomi regional juga tidak bisa lepas dari peran pengeluaran pemerintah di sektor layanan publik. Pengeluaran pemerintah daerah diukur dari total belanja operasional dan belanja modal yang dialokasikan dalam anggaran daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu daerah dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak, sehingga memungkinkan untuk kenaikan standar hidup. Dengan demikian ada hubungan antara kinerja keuangan, alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Menurut Halim (2008) analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, *debt service coverage ratio*, dan pertumbuhan. Untuk menganalisis kinerja keuangan dan pengaruhnya pada alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, maka analisis pada kinerja keuangan difokuskan pada lima indikator keuangan, yaitu: derajat desentralisasi, ketergantungan

keuangan, kemandirian keuangan, rasio efektivitas, dan derajat kontribusi BUMD.

Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD pada total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat desentralisasi dihitung dengan formula PAD dibagi dengan total pendapatan daerah dikalikan 100% (BPKP, 2012). Ketergantungan keuangan dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar ketergantungan daerah pada pemerintah pusat/provinsi. Ketergantungan keuangan dihitung dengan formula Pendapatan Transfer dibagi dengan total pendapatan daerah dikalikan 100% (BPKP, 2012). Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan pemerintah daerah pun semakin baik. Derajat kontribusi BUMD digunakan untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio ini dihitung dengan formula penerimaan bagian laba BUMD dibagi dengan penerimaan PAD kemudian dikalikan 100% (BPKP, 2012).

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan berakibat menambah belanja yang bersifat rutin. Belanja modal sangat erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Halim (2008) menyatakan bahwa kata investasi dapat diartikan macam-macam tergantung pada titik pandang atau konteks mengartikannya. Dalam PP No. 58 Tahun 2005 disebutkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau

kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja operasional. Dalam PSAP Nomor 2, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

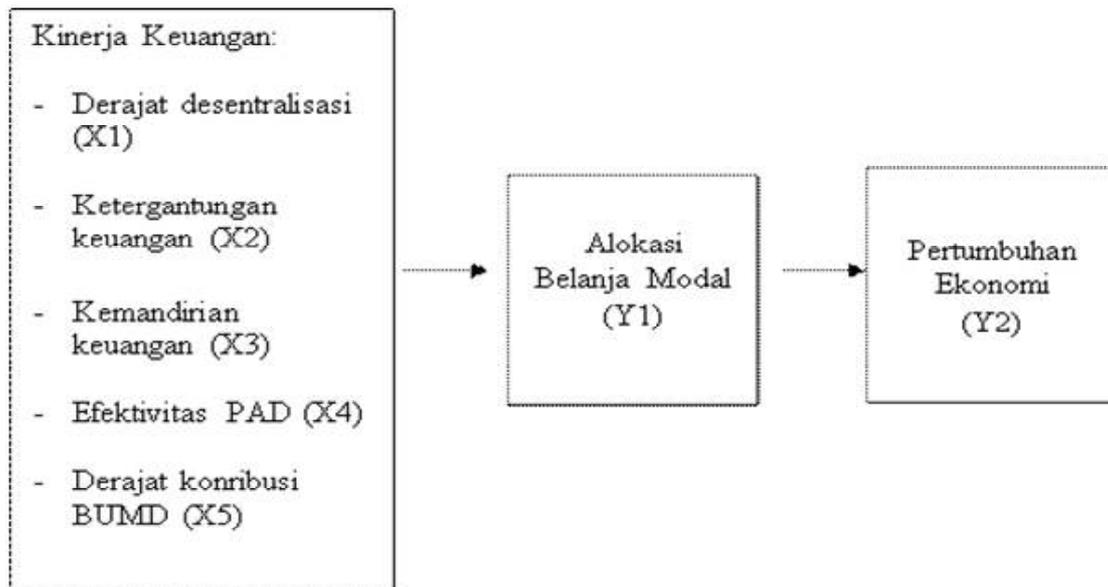
Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai meningkatnya kegiatan ekonomi pada suatu daerah yang akan berdampak pada tingkat kemakmuran dan kemandirian daerah. Pertumbuhan ini akan terjadi apabila seluruh pemangku kepentingan di daerah bekerjasama dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi seperti meningkatkan investasi. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan di sektor-sektor yang produktif. Salah satu faktor yang dapat mendorong semakin tingginya kemampuan keuangan daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Saragih (2003) mengemukakan bahwa kenaikan PAD merupakan eksis dari pertumbuhan ekonomi. Bappenas (2004) juga menyatakan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif pada pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang beberapa hal. Pertama, menguji pengaruh langsung derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektivitas PAD, dan kontribusi BUMD

pada alokasi belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Bali. Kedua, pengaruh langsung alokasi belanja modal pada pertumbuhan ekonomi pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali. Ketiga, menguji pengaruh tidak langsung derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektivitas PAD, dan kontribusi BUMD pada pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Diberlakukannya desentralisasi fiskal merupakan dampak diterapkannya otonomi daerah, dimana dalam otonomi daerah, daerah berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga di daerahnya sendiri. Setiap daerah memiliki pemerintahan daerahnya sendiri yang menjalankan kewenangannya sendiri yang tidak dapat diganggu gugat oleh daerah lain, baik secara horisontal maupun vertikal. Pengalokasian belanja modal yang memadai akan semakin meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, sehingga kondisi ini akan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini akan memicu pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat pula. Untuk dapat mengalokasikan belanja modal yang memadai, maka pemerintah daerah harus memiliki kinerja keuangan yang memadai. Berdasarkan uraian diatas maka model yang dikembangkan dalam penelitian ini seperti Gambar 1.



Gambar 1
Model Penelitian

Hipotesis

Berdasarkan kajian teoritis dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dikembangkan pada penelitian ini adalah:

- H₁: Derajat desentralisasi, Kemandirian keuangan, Efektifitas PAD, Derajat kontribusi BUMD pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali secara langsung berpengaruh positif pada alokasi belanja modal.
- H₂: Ketergantungan keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali secara langsung berpengaruh negatif pada alokasi belanja modal.
- H₃: Alokasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali secara langsung berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.
- H₄: Derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektifitas PAD, derajat kontribusi BUMD pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali secara tidak langsung berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja modal.

Penelitian ini dilaksanakan pada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali pada Tahun 2014. Penelitian ini menganalisis pengaruh komponen kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali pada alokasi biaya modal dan pertumbuhan ekonomi pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali tahun 2006 s.d. 2013.

Teknik Analisis Data

Path Analysis

Pada penelitian ini, digunakan analisis jalur (*path analysis*) dengan Program Eviews berdasarkan data sekunder berupa data panel. Data tersebut merupakan gabungan antara data silang (*cross section*) dengan data runtut waktu (*time series*). Data panel diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1950. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menguji secara bersama-sama model yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen.

Analisis jalur digunakan untuk menganalisis hubungan antarvariabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung, seperangkat variabel bebas (eksogen) pada variabel terikat (endogen). Model analisis jalur merupakan pola hubungan sebab akibat atau *a set of hypothesized causal asymmetric relation among the variable*, Ridwan dan Engkos (2007). Dalam

pembahasan teknik estimasi model regresi data panel, ada tiga teknik yang dapat digunakan, yaitu: 1) Model dengan metode *OLS (common)*, 2) Model *Fixed effect*, 3) Model *Random effect*.

Pertama yang harus dilakukan adalah melakukan uji F untuk memilih metode mana yang terbaik diantara ketiga metode tersebut dilakukan uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow dilakukan untuk menguji antara metode *common effect* dan *fixed effect*, sedangkan uji Hausman dilakukan untuk menguji apakah data dianalisis dengan menggunakan *fixed effect* atau *random effect*, pengujian tersebut dilakukan dengan Eviews. Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji Chow adalah sebagai berikut: Jika nilai probability $F_e > 0,05$ artinya H_0 diterima; maka model yang dipilih adalah model *common effect* dan jika nilai probability $F < 0,05$ artinya H_0 ditolak; maka modal yang dipilih adalah model *fixed effect*, dan dilanjutkan dengan uji Hausman untuk memilih apakah menggunakan metode *fixed effect* atau metode *random effect*.

Selanjutnya untuk melakukan *Hausman Test*, data juga diregresikan dengan metode *random effect*, kemudian dibandingkan antara *fixed effect* dan *random effect* dengan membuat hipotesis. Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji Hausman adalah sebagai berikut: Jika Nilai *probability Chi-Square* $e > 0,05$, maka H_0 diterima, yang artinya model *random effect* dan sebaliknya, jika Nilai *probability Chi-Square* $< 0,05$, maka H_0 diterima, yang artinya model *fixed effect*.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel bebas pada variabel terikatnya, dimana jika variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan pada variabel terikat maka model persamaan regresi masuk dalam kriteria cocok atau *fit*.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009: 87). Total

variasi yang dapat dijelaskan oleh semua variabel yang dilibatkan dalam model diukur dengan:

$$R_m^2 = 1 - (e_1^2 e_2^2 \dots e_p^2)$$

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji hipotesis menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat pada hasil regresi yang dilakukan dengan Program Eviews, yaitu dengan membandingkan tingkat si masing-masing variabel bebas dengan $\alpha = 0,05$.

Pengujian Hipotesis Mediasi

Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel tahun 1982 (dalam Baron and Kenny, 1986) dan dikenal dengan uji Sobel (*Sobel test*). Sobel test akan menghasilkan standar error dari pengaruh tidak langsung x pada y2 melalui mediasi y1, yaitu koefisien ab, dengan standar deviasi ab adalah sebagai berikut:

$$S_{ab} = \sqrt{b^2 S_a^2 + a^2 S_b^2}$$

$$Z_{hitung} = \frac{a \times b}{\sqrt{b^2 S_a^2 + a^2 S_b^2}}$$

Nilai Zhitung dibandingkan dengan nilai kritis yaitu 1,96. Jika nilai Zhitung > 1,96 maka mengindikasikan adanya pengaruh mediasi variabel Y1 pada pengujian hubungan X pada Y2.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Variabel Penelitian

Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah rata-rata (mean), standar deviasi (standard deviation), maksimum, dan minimum. Statistik Deskriptif data penelitian ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1
Statistik Deskriptif Data Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Derajat Ketergantungan (X1)	72	0.03	0.77	0.18	0.18
Ketergantungan Keuangan (X2)	72	0.22	0.97	0.81	0.18
Kemandirian Keuangan (X3)	72	0.03	3.53	0.35	0.65
Efektivitas PAD (X4)	72	0.9	1.69	1.17	0.14
Derajat Kontribusi BUMD (X5)	72	0.02	0.14	0.07	0.04
Alokasi Belanja Modal (Y1)	72	0.06	0.31	0.16	0.06
Pertumbuhan Ekonomi (Y2)	72	0.07	0.26	0.14	0.04

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 1 variabel kinerja keuangan yang diukur dengan Derajat Ketergantungan (X1), Ketergantungan Keuangan (X2), Kemandirian Keuangan (X3), Efektivitas PAD (X4), Derajat Kontribusi BUMD (X5) menunjukkan bahwa rasio derajat ketergantungan mempunyai nilai minimum sebesar 3 persen, terbesar sebesar 77 persen dengan rata-rata sebesar 18 persen dan standar deviasinya sebesar 18 persen. Rasio ketergantungan keuangan mempunyai nilai rata-rata sebesar 81 persen, nilai terbesar sebesar 97 persen, nilai minimum sebesar 22 persen dengan standar deviasinya sebesar 18 persen. Rasio kemandirian keuangan mempunyai nilai minimum sebesar 3 persen, terbesar sebesar 353 persen dengan rata-rata sebesar 35 persen dan standar deviasinya sebesar 65 persen. Efektivitas PAD mempunyai nilai rata-rata sebesar 117 persen,

nilai tertinggi 169 persen, terendah sebesar 90 persen dengan standar deviasi sebesar 14 persen. Derajat kontribusi BUMD mempunyai nilai terbesar sebesar 14 persen, nilai minimum 2 persen dengan rata-rata 7 persen dan standar deviasi sebesar 4 persen.

Variabel alokasi belanja modal yang merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya mempunyai nilai rata-rata sebesar 16 persen. Nilai tertinggi variabel ini sebesar 31 persen, nilai terendah sebesar 6 persen dan standar deviasi sebesar 6 persen.

Variabel pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan PDRB dari tahun ke tahun mempunyai nilai rata-rata sebesar 14 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 26 persen dengan pertumbuhan ekonomi terendah sebesar 7 persen dan standar deviasi sebesar 4 persen.

Pengujian Kesesuaian Model

Hasil pengujian pada kesesuaian model/model yang paling tepat menggunakan uji Chow dan uji Hausman.

Uji Chow (Chow Test)

Hasil pengujian ditunjukkan seperti pada Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Uji Chow

Keterangan	Persamaan 1	Persamaan 2
F Hitung	23.56	112.38
F Tabel	2.17	2.17

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh nilai F hitung untuk kedua persamaan lebih besar dari F tabel, yaitu untuk persamaan 1, diperoleh F hitung sebesar 23,56, sedangkan untuk persamaan 2 diperoleh F hitung sebesar 112,38, lebih besar dari F tabel sebesar 2,17. Berdasarkan hasil tersebut, maka model yang pilih adalah *fixed effect model*.

Uji Hausman (Hausman Test)

Uji Hausman dilakukan untuk menguji apakah data dianalisis dengan menggunakan *fixed effect* atau

random effect. Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Uji Hausman

Keterangan	Persamaan 1	Persamaan 2
Chi Square	0.22	6.01
P Value	0.99	0.42

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel tersebut di atas, diperoleh nilai P Value untuk kedua persamaan lebih besar dari $\alpha=0,05$, yaitu untuk persamaan 1, diperoleh P Value sebesar 0,99, sedangkan untuk persamaan 2 diperoleh P Value sebesar 0,42. Berdasarkan hasil tersebut, model yang pilih adalah *Random effect model*.

Uji Pengaruh Langsung

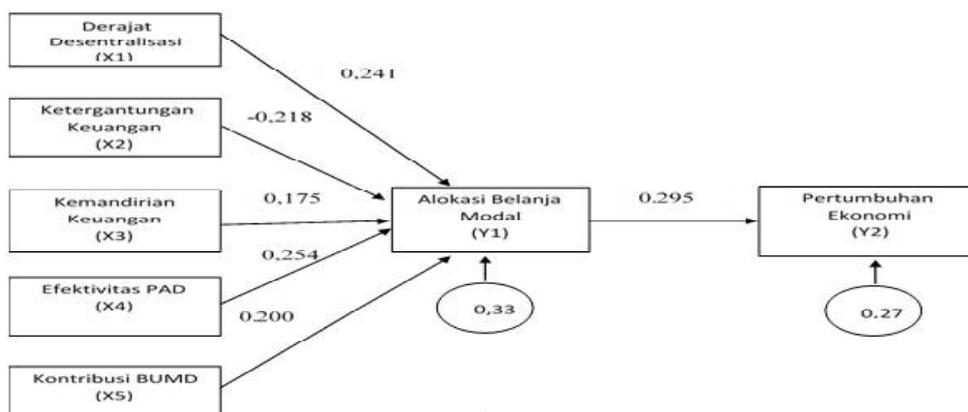
Uji hipotesis menunjukkan bagaimana pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat pada hasil regresi yang dilakukan dengan program Eviews, yaitu dengan membandingkan tingkat si masing-masing variabel bebas dengan $\alpha = 0,05$. Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Pengaruh Langsung

Variabel	B	β_{Std}	t hitung	Sig.
X1 → Y1	3.216	0,241	2.9214	0.0048
X2 → Y1	-1.356	-0.218	-3.2620	0.0018
X3 → Y1	0.174	-0.175	0.4757	0.6358
X4 → Y1	0.556	0.254	4.1585	0.0001
X5 → Y1	0.059	0.200	-1.2773	0.2059
Y1 → Y2	0.014	0.295	5.7762	0.0000

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 4, hubungan antarvariabel dapat dilihat lebih jelas pada Gambar 2



Gambar 2
Hubungan Antarvariabel

Berdasarkan hasil uji t seperti Tabel 4, maka dapat disimpulkan bahwa Derajat Desentralisasi mempunyai koefisien beta sebesar 0,241 dengan nilai *si* sebesar 0,0048 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti Derajat Desentralisasi berpengaruh positif pada alokasi belanja modal. Ketergantungan Keuangan mempunyai koefisien beta sebesar -0,218 dengan nilai *si* sebesar 0,0018 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti Ketergantungan Keuangan berpengaruh negatif pada alokasi belanja modal. Kemandirian Keuangan mempunyai koefisien beta sebesar 0,175 dengan nilai *si* sebesar 0,6358 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti Kemandirian Keuangan tidak berpengaruh pada alokasi belanja modal. Efektivitas PAD mempunyai koefisien beta

sebesar 0,254 dengan nilai *si* sebesar 0,0001 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti Efektivitas PAD berpengaruh positif pada alokasi belanja modal. Derajat Kontribusi BUMD mempunyai koefisien beta sebesar 0,200 pada alokasi belanja modal. Hal ini berarti Derajat Kontribusi BUMD tidak berpengaruh positif pada alokasi belanja modal. Alokasi Belanja Modal mempunyai koefisien beta sebesar 0,295 dengan nilai *si* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti Alokasi Belanja Modal berpengaruh positif pada alokasi Pertumbuhan Ekonomi.

Uji Pengaruh Tak Langsung

Pada penelitian ini, uji Sobel digunakan untuk menguji analisis *path*. Hasil uji sobel ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji Sobel (Pengaruh Tidak Langsung)

Variable	Coefficient	Std. Error	a xb	Sab	Z
X1	3.2162	1.1009	0.0458	0.0175	2.6069
X2	-1.3561	0.4157	-0.0193	0.0068	-2.8403
X3	0.1741	0.3661	0.0024	0.0052	0.4741
X4	0.5569	0.1339	0.0079	0.0023	3.3747
X5	0.0590	0.0462	0.0008	0.0006	1.2472

Sumber: data diolah

Berdasarkan Tabel 5, menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung Derajat Desentralisasi pada Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai Z sebesar 2,607 yang lebih besar dari 1,96. Hal tersebut membuktikan bahwa secara tidak langsung Derajat Desentralisasi melalui alokasi belanja modal berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Pengaruh tidak langsung Ketergantungan Keuangan pada Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai Z sebesar -2,840 yang lebih besar dari 1,96. Hal tersebut membuktikan bahwa secara tidak langsung Ketergantungan Keuangan melalui alokasi belanja modal berpengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi. Pengaruh tidak langsung Kemandirian Keuangan pada Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai Z sebesar 0,474 yang lebih kecil dari 1,96. Hal tersebut membuktikan bahwa secara tidak langsung Kemandirian Keuangan melalui alokasi belanja modal tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Pengaruh tidak langsung Efektivitas PAD pada Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai Z sebesar 3,374 yang lebih besar dari 1,96. Hal tersebut membuktikan bahwa secara tidak langsung

Efektivitas PAD melalui alokasi belanja modal berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Pengaruh tidak langsung Derajat Kontribusi BUMD pada Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai Z sebesar 1,247 yang lebih kecil dari 1,96. Hal tersebut membuktikan bahwa secara tidak langsung Derajat Kontribusi BUMD melalui alokasi belanja modal tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis, derajat desentralisasi dan efektivitas PAD berpengaruh positif pada alokasi belanja modal. Ketergantungan keuangan berpengaruh negatif pada alokasi belanja modal. Namun demikian, kemandirian keuangan dan kontribusi BUMD, sesuai dengan hasil analisis, tidak berpengaruh secara pada alokasi belanja modal. Secara umum, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sularso dan Restianto (2011) yang menemukan adanya pengaruh antara kinerja keuangan dengan alokasi biaya modal.

Variabel Alokasi Belanja Modal mempunyai koefisien beta sebesar 0.014 dengan nilai t sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis ketiga yang dikembangkan dalam penelitian ini diterima. Dengan demikian, Alokasi Belanja Modal berpengaruh positif pada Pertumbuhan Ekonomi pemerintah kabupaten/kota se-provinsi Bali.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Adi (2007) yang menyatakan bahwa belanja modal pembangunan daerah sangat menentukan pertumbuhan ekonomi. Penelitian Wong (2002) yang menunjukkan adanya kontribusi positif pada PAD ketika pemerintah melakukan pembangunan pada sektor industri. Penelitian yang dilakukan Lin dan Liu (2000) yang menemukan korelasi yang kuat antara share belanja investasi dengan tingkat desentralisasi. Penelitian Sularso dan Restianto (2011) yang menemukan alokasi belanja modal berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Namun tidak sejalan dengan hasil penelitian Fitriyanti dan Pratolo (2009) yang menemukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Hasil analisis, kinerja keuangan secara tidak langsung berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja modal, khususnya yang berkaitan dengan komponen derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, dan efektivitas PAD. Namun demikian, kemandirian keuangan dan kontribusi BUMD, sesuai dengan hasil analisis, secara tidak langsung, tidak berpengaruh secara langsung pada pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja modal. Secara umum, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sularso dan Restianto (2011) yang menemukan secara tidak langsung adanya pengaruh antara kinerja keuangan dengan pertumbuhan ekonomi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya diperoleh hasil bahwa derajat desentralisasi dan efektivitas PAD berpengaruh positif pada belanja modal, ketergantungan keuangan berpengaruh negatif pada alokasi belanja modal, sedangkan kemandirian keuangan dan kontribusi BUMD tidak berpengaruh pada alokasi belanja modal. Alokasi belanja modal berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang selama ini dilaksanakan ditentukan oleh alokasi

belanja modal yang dilaksanakan pemerintah, dan semakin tinggi alokasi biaya modal yang dikeluarkan, maka dapat menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Dari lima indikator kinerja keuangan daerah yang digunakan dalam penelitian ini, tiga indikator kinerja keuangan daerah yang secara tidak langsung berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Ketiga indikator tersebut adalah derajat desentralisasi keuangan dan efektivitas PAD, secara tidak langsung berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja modal dan ketergantungan keuangan, secara tidak langsung berpengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Hal tersebut menunjukkan bahwa derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan dan efektivitas PAD secara tidak langsung berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja modal

Saran

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota tahun 2006 s.d. 2013, tanpa dilakukan konfirmasi dalam bentuk observasi langsung, wawancara dan penggunaan daftar pertanyaan berupa kuesioner untuk mengetahui kendala-kendala dalam pencapaian kinerja yang baik. Penelitian ini juga baru menggunakan 6 rasio kinerja keuangan yaitu: derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektivitas PAD dan derajat kontribusi BUMD dan alokasi belanja modal yang digunakan untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali.

Dari hasil penelitian menunjukkan rasio efektivitas berpengaruh paling pada alokasi belanja modal. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan bahwa dalam melakukan pengeluaran daerah, tidak semata-mata melalui pengalokasian belanja modal secara langsung, melainkan dapat mempertimbangan pengeluaran untuk intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka optimalisasi PAD.

Intensifikasi dalam rangka optimalisasi PAD, dapat berupa kegiatan yang sangat sederhana, namun di banyak daerah sangat jarang dilakukan, misalnya berupa kegiatan pemutakhiran data wajib pajak daerah dan atau wajib pajak retribusi daerah. Dengan kegiatan pemutakhiran tersebut, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi yang dimiliki atas besarnya wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dihasilkan.

Ekstensifikasi dalam rangka optimalisasi PAD, dapat berupa kegiatan untuk mengidentifikasi atas objek pajak daerah maupun retribusi daerah yang telah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan instrumen kuesioner dan melakukan pengamatan langsung ke pemerintah daerah, serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Penelitian selanjutnya juga dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain seperti rasio efisiensi belanja, rasio likuiditas, dan solvabilitas, sehingga hasil penelitian lebih representatif.

REFERENSI

- Adi, P. H. .2005. Dampak Desentralisasi Fiskal Pada Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Kritis*. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- BPKP, 2012. *Petunjuk Penyusunan Kompilasi Laporan Keuangan dan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Revisi)*.
- Fitriyanti dan Pratolo. 2008. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan Pada Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi. *Proceeding Konferensi Penelitian Keuangan Sektor Publik*. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2002. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- _____. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, A. dan Abdullah, S. 2006. Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintahan Daerah (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi). *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol.2 No.1: 53-64.
- Lin, J. Y, dan Liu, Z. 2000. Fiscal Decentralization and Economic Growth ni China, *Economic Development and Cultural Change*. Chicago. Vol 49.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Ridwan, Kuncoro Engkos Achmad. 2007. *Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis)*. Cetakan Pertama. Bandung : Alfabeta.
- Saragih, J. P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Sularso, H., dan Restianto, Y.E. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*. Vol.1 No.2: 109-124.
- Wong, J. D. 2004. *The Fiscal Impact of Economic Growth and Development on Local Government Capacity*. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Man-agement*. Fall, 16.3.